

Laporan Kinerja  
KPKNL Jember

2023

Menuju Stabilitas Ekonomi  
Tetap Optimis & Waspada



# Daftar Isi

## I

### **Pendahuluan**

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	3
Aspek Strategis Organisasi	5
Permasalahan Utama	6

## II

### **Perencanaan Kinerja**

Sasaran Strategis	7
-------------------	---

## III

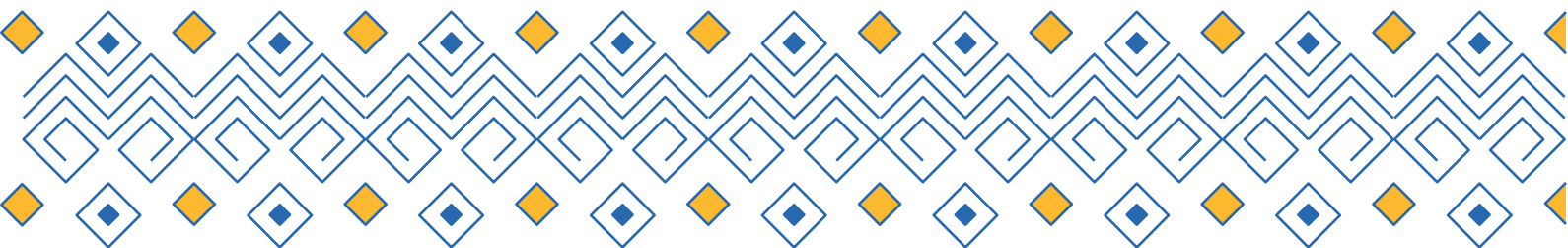
### **Akuntabilitas Kinerja**

Capaian Kinerja Organisasi	9
Realisasi Anggaran	26

## IV

### **Penutup**

	27
--	----



# BAB I | Pendahuluan



A Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

B Aspek Strategi Organisasi

C Permasalahan Utama



**BAB I****PENDAHULUAN****A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJKN yang mempunyai wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang. Saat ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember beralamat di Jl.Slamet Riyadi 344 A Jember.

Struktur organisasi KPKNL Jember terdiri atas Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi Piutang Negara, Seksi Hukum dan Informasi, Subbagian Umum, Seksi Kepatuhan Internal serta Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan tugas, KPKNL menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan, eksekusi, pemeriksaan harta kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
8. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;



9. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan;
10. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Tugas dan Fungsi sebagaimana tersebut diatas, dilaksanakan oleh 4 seksi dan subagian umum serta Kelompok Jabatan Fungsional yang ada pada KPKNL Jember. Adapun struktur organisasi KPKNL Jember adalah sebagai berikut:

**BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
JEMBER**



Dalam menjalankan tugasnya KPKNL Jember didukung oleh 30 orang pegawai dan komposisi pegawai KPKNL Jember berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, gender, dan umur adalah sebagai berikut:

**A. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

TK. PENDIDIKAN	GOL RUANG			JUMLAH
	II	III	IV	
SLTA	1	3	-	4
D1	-	-	-	-
D3	2	3	-	5
S1	-	17	-	17
S2	-	-	4	4
<b>JUMLAH</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>30</b>

**B. Komposisi Pegawai Berdasarkan Gender**

JENIS KELAMIN	II	III	IV	JUMLAH
Perempuan	1	5	1	7
Laki-laki	2	18	3	23
JUMLAH	3	23	4	30

**C. Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur Dan Golongan**

KELOMPOK UMUR	II	III	IV	JUMLAH
18-30	2	1	-	3
31-40	-	12	-	12
41-50	-	7	3	10
Diatas 50	1	3	1	5
JUMLAH	3	23	4	30

**D. Komposisi Pegawai Berdasarkan Fungsional Teknis**

FUNGSIONAL TEKNIS	II	III	IV	JUMLAH
Pelelang	-	3	-	3
Penilai	-	3	-	3

**B. Aspek strategis organisasi**

Dalam menjalankan tugasnya KPKNL Jember berperan serta untuk mewujudkan Visi besar Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yaitu “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” melalui Tugas Pokok dan fungsi yang dijabarkan ke dalam 9 item Sasaran Strategis (SS) Organisasi sebagaimana berikut:

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan.

Pencapaian SS diukur melalui 3 Indikator Kinerja Utama (IKU):

- Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang.
- Persentase produktivitas lelang.
- Indeks Integritas.

2. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa. Pencapaian SS diukur melalui 2 Indikator Kinerja Utama (IKU):

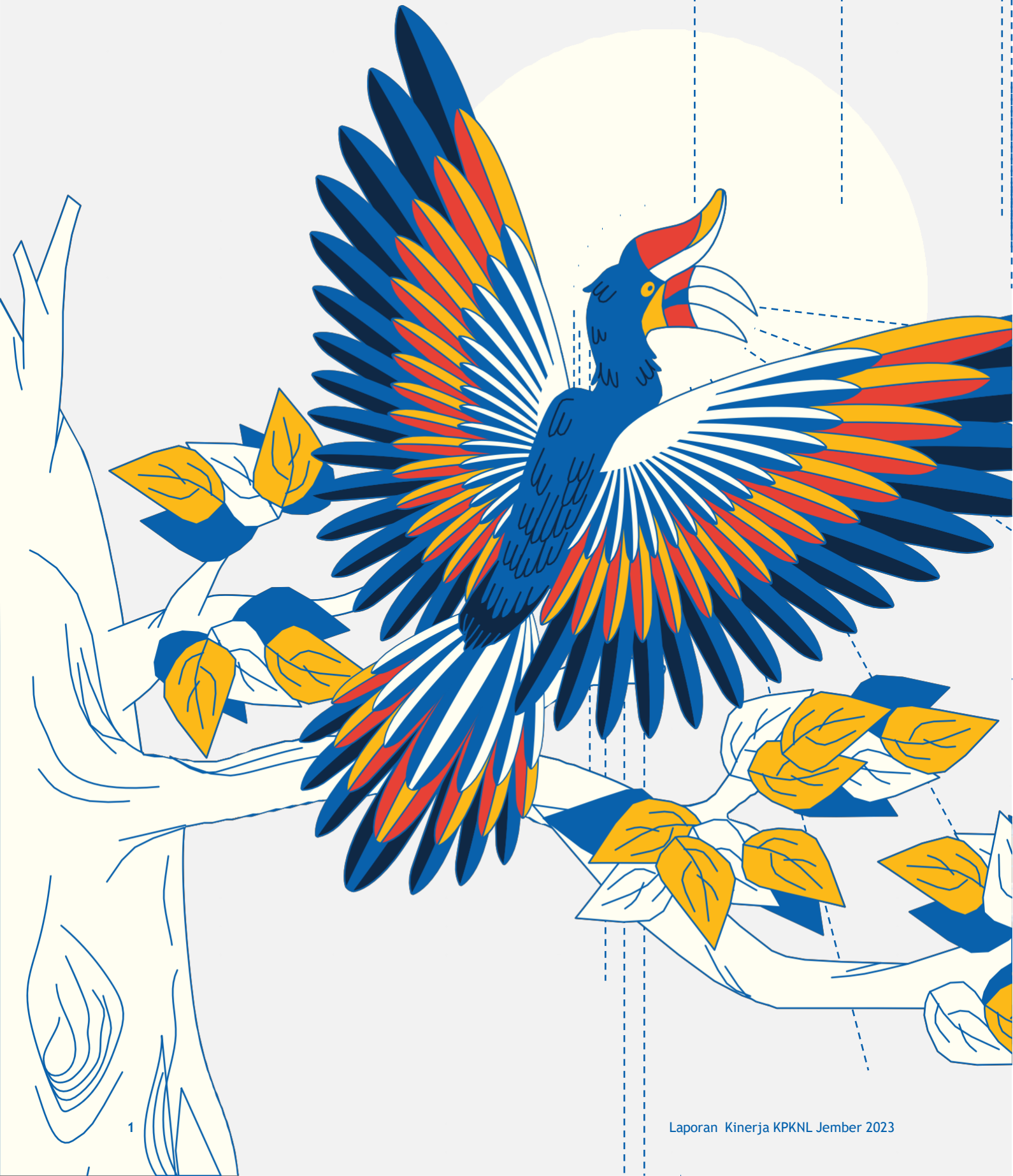
- Persentase Realisasi Pokok Lelang

- Persentase Penurunan Outstanding Puitang Negara.
- 3. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal.  
Pencapaian SS diukur melalui 3 Indikator Kinerja Utama (IKU):
  - Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK.
  - Persentase BMN berupa tanah yang disertifikatkan.
  - Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara..
- 4. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional.  
Pencapaian SS diukur melalui 2 Indikator Kinerja Utama (IKU):
  - Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian.
  - Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien.
- 5. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif.  
Pencapaian SS diukur melalui 1 Indikator Kinerja Utama (IKU)
  - Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara.
- 6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif.  
Pencapaian SS diukur melalui 3 Indikator Kinerja Utama (IKU):
  - Evaluasi Kinerja BMN (portofolio asset).
  - Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction.
  - Persentase pelaksanaan permohonan lelang online.
- 7. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif.  
Pencapaian SS diukur melalui 1 Indikator Kinerja Utama (IKU):
  - Persentase pengembangan kompetensi pegawai.
- 8. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal.  
Pencapaian SS diukur melalui 3 Indikator Kinerja Utama (IKU):
  - Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.
  - Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan.
  - Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN.
- 9. Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif.  
Pencapaian SS diukur melalui 2 Indikator Kinerja Utama (IKU):
  - Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif.
  - Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko.

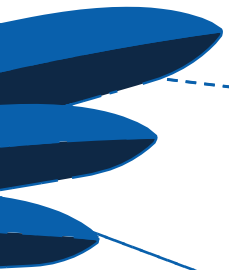
### **C. Permasalahan Utama (*strategic issue*)**

Selama periode Januari s.d Desember 2023, target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) telah terlampaui. Proses pencapaian seluruh IKU dimaksud akan dijelaskan dalam BAB III Akuntabilitas Kinerja huruf A. Capaian Kinerja Organisasi.

## BAB II | Perencanaan Kinerja



Sasaran Strategis



**BAB II****PERENCANAAN KINERJA****Sasaran Strategis**

Perencanaan strategis KPKNL Jember disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam diktum kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Dalam dokumen Renstra diuraikan secara jelas mengenai: visi, misi, strategi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai melalui pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan realistis per tahun.

Visi DJKN adalah menjadi pengelola kekayaan negara, piutang negara, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

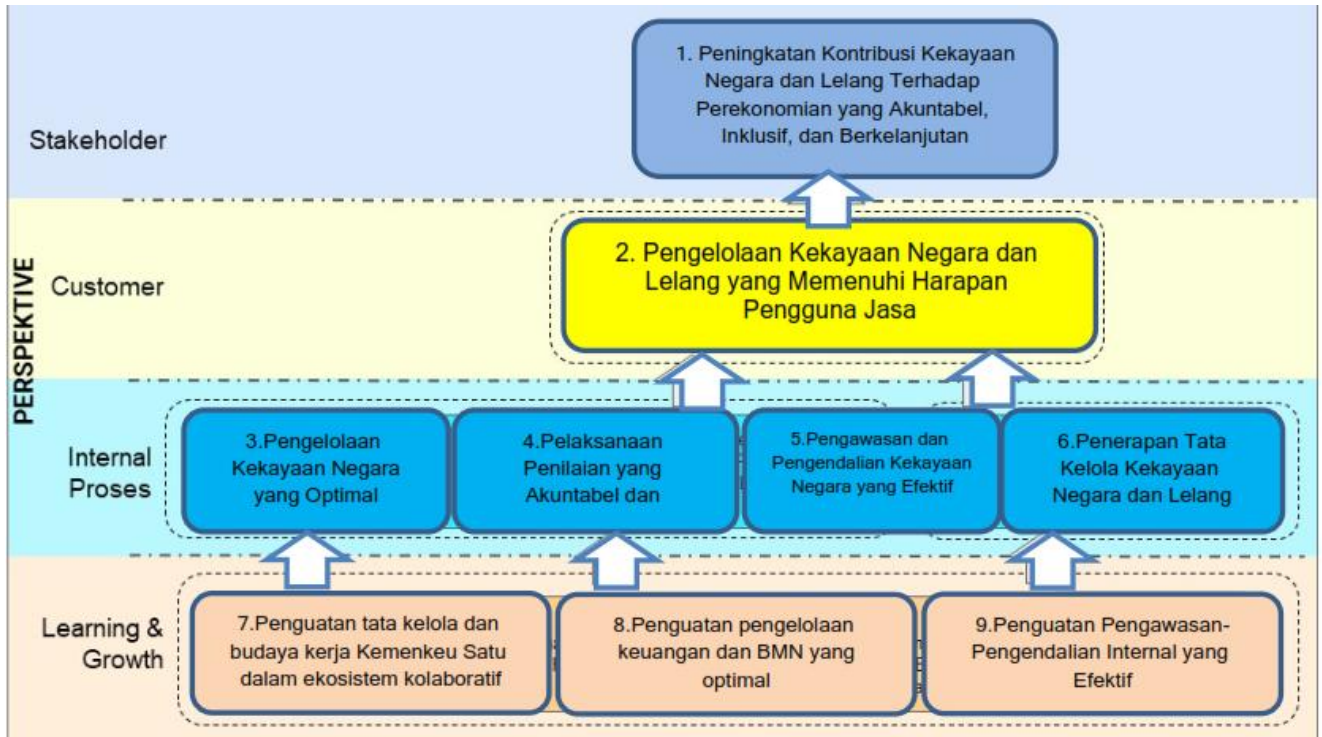
Misi DJKN adalah:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Adapun Strategi KPKNL Jember terdiri dari 9 Sasaran Strategis (SS), antara lain:

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
3. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal;
4. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
5. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif;
6. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif;
7. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif;
8. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal;
9. Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif.

Sasaran Strategis (SS) KPKNL Jember dapat digambarkan dalam Peta Strategi sebagai berikut:



Penetapan Kinerja/ perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan penetapan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Pelaksanaan Sasaran Strategis ditetapkan dalam sebuah dokumen Kontrak Kinerja yang ditandatangani di awal tahun, di dalam Kontrak Kinerja tercantum target dan rincian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai. Penetapan Kontrak Kinerja Kemenkeu Three KPKNL Jember pada tahun 2023 dituangkan dalam dokumen Kontrak Kinerja sebagaimana terlampir.

# BAB III | Akuntabilitas Kinerja



A Capaian Kinerja Organisasi

B Realisasi Anggaran



**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Ikhtisar capaian kinerja KPKNL Jember Tahun 2023 adalah tergambar dalam perhitungan Nilai Kinerja Organisasi sebagai berikut:

**PENGUKURAN KINERJA**  
**KPKNL JEMBER**  
**TAHUN 2023**

No.	Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Indeks maks 120%
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan	1a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	125,15%	120,00%
		1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%	126,21%	120,00%
		1c-CP	Indeks Integritas	88,67	89,17	100,56%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	161,51%	120,00%
		2b-CP	Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	100%	142,51%	120,00%
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	3a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	82,20 %	120,88%	120,00%
		3b-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertifikatkan	100%	125,11%	120,00%
		3c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	121,31%	120,00%
4.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	4a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	200,00%	120,00%
		4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	120,88%	120,00%
5.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	5a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	91,67%	106,59%
6.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	6a-CP	Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset)	100%	155,76%	120,00%
		6b-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	96,92%	103,11%

		6c-CP	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	86%	111,09%	111,09%
7.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	7a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120%	120%
8.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal	8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	100	120	120%
		8b-N	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%	260,33%	120%
		8c-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	0,00%	120%
9.	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif	9a-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60	92,2	153,37%
		9b-CP	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	95,16	118,95%

Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian setiap Sasaran Strategis (SS) yang terinci dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan capaian IKU dan kegagalan capaian IKU dengan cara membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang berhasil dicapai. Adapun hasil analisis terhadap pencapaian setiap Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:

**1. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang**

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara pada lingkup instansi vertikal berasal dari:

- a. PNBPN Kekayaan Negara (PNBPN BMN) yaitu: penerimaan dari hasil pemanfaatan aset BMN yang dikelola oleh KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan dan penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang dikelola oleh KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan penerimaan dari hasil pemanfaatan maupun penjualan BMN pada K/L.
- b. PNBPN Piutang Negara (PNBPN PN) yaitu Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.
- c. PNBPN Lelang (PNBPN Lelang) yaitu dari :
  1. Bea Lelang,
  2. Bea Lelang Pegadaian,
  3. denda keterlambatan penyeteroran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang
  4. biaya permohonan lelang,
  5. penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi,
  6. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Rincian komponen dari IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Jenis PNBPN	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PNBP Aset	11.400.000.000	13.396.144.348	117,51%
PNBP PN	6.000.000	20.000.210	333,34%
PNBP Lelang	4.620.000.000	6.641.032.142	143,75%
Jumlah	16.026.000.000,00	20.057.176.700	125,15%

Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang dapat dilihat dalam tabel berikut:

KPKNL JEMBER	1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
	1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	21,27%	41,95%	41,95%	87,07%	87,07%	125,15%	125,15%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Dari tabel tersebut diketahui hal sebagai berikut:

- a. Jumlah target PNBPN sebesar 16.026.000.000,00;
- b. Sampai dengan Q4 2023, realisasi sebesar 20.057.176.700. **Target Tahunan tercapai.**

Adapun langkah-langkah yang dilakukan sehingga target dapat dicapai:

- a. Menjalankan proses lelang sesuai prosedur;
- b. Menerbitkan persetujuan sewa dan persetujuan penjualan BMN;
- c. Melakukan rekapitulasi PNBPN dari pendapatan BLU satker K/L;
- d. Melakukan penagihan BKPN.

## 2. Persentase Produktivitas Lelang

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.

Persentase Realisasi Produktivitas Lelang KPKNL Jember tahun 2023 adalah sebagai berikut:

KPKNL JEMBER	1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian							
	1b-CP Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	30%	45%	45%	80%	80%	80%	80%	Max/TLK
Realisasi	56,20%	65,72%	65,72%	81,31%	81,31%	101,15%	101,15%	
Capaian	120%	120%	120%	101,63%	101,63%	120%	120%	

Realisasi target IKU Persentase Produktivitas Lelang sampai dengan Q4 2023 telah tercapai. Tindakan Yang Telah Dilaksanakan dalam upaya mencapai target adalah dengan memasarkan lelang kepada stakeholder dan menjalankan proses lelang sesuai prosedur. Kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Target	Realisasi	%
2019	30%	32,15%	107,16%
2020	34%	34,83%	102,44%
2021	35%	38,44%	109,82%
2022	36%	41,07%	114,08%
2023	80%	120%	120%

### 3. Indeks Integritas

IKU Indeks Integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

Persentase realisasi Indeks Integritas tahun 2023 adalah sebagai berikut:

KPKNL JEMBER	1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan							
	1c-CP Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target						86,67	86,67	Max/TLK
Realisasi						89,17	89,17	
Capaian						100,56%	100,56%	

#### 4. Persentase realisasi Pokok Lelang

IKU Persentase realisasi Pokok Lelang menghitung hasil penjualan lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Jafung Pelelang/Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan hasil lelang yang berasal dari pegadaian. Target dan realisasi tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Jenis Lelang	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pelelang	80.850.000.000	127.671.678.567	157,91%
Pegadaian	39.900.000.000	67.352.193.600	168,80%
Jumlah	120.750.000.000	195.023.872.167	161,51%

Persentase Realisasi IKU Hasil Lelang dapat dilihat dalam tabel berikut:

KPKNL JEMBER	2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2a-CP Persentase realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	14,27%	38,06%	38,06%	93,91%	93,91%	161,51%	161,51%	
Capaian	71,34%	95,15%	95,15%	120%	120%	120%	120%	

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi target IKU Persentase Hasil Lelang sampai dengan Q4 2023 telah tercapai. **Target Tahunan tercapai.**

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai target IKU adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan para pemohon lelang untuk melaksanakan lelang terhadap objek-objek lelang yang potensial untuk laku dan nilainya

cukup besar.

- b. Melakukan penggalian potensi lelang.
- c. Mempersiapkan kelengkapan berkas yang harus dipenuhi di awal. (contoh mempersiapkan surat kuasa untuk pengurusan SKPT).

Kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Target	Realisasi	%
2019	Rp141.281.229.000	Rp106.737.291.731	75,55%
2020	Rp148.756.000.000	Rp79.730.064.254	53,6%
2021	Rp107.000.000.000	Rp373.971.168.139	349,51%
2022	Rp138.000.000.000	Rp231.531.237.593	167,78%
2023	Rp120.750.000.000	Rp195.023.872.167	161,51%

#### 5. Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara

Mengukur outstanding piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN. Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah untuk BKPN dengan SP3N s.d 31 Desember 2017 adalah Angsuran, Pelunasan, Penarikan/Pengembalian, Pelunasan, PSBDT, dan Keringanan hutang terhadap BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2017 atau sebelumnya yang lunas pada tahun 2023.

Berikut Capaian s.d. Q4 2023:

Target	Realisasi	%
1.132.000.000	1.613.194.134	142,51%

Berikut Realisasi Capaian IKU Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara tahun 2023:

KPKNL JEMBER	2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2b-CP Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Po//KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	4,13%	76,06%	76,06%	109,58%	109,58%	142,51%	142,51%	
Capaian	41,30%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Dari tabel tersebut diketahui realisasi target IKU Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara sampai dengan Q4 2023 telah tercapai. **Target Tahunan tercapai.**

Adapun langkah-langkah yang dilakukan sehingga target dapat dicapai adalah:

1. Menerbitkan Panggilan Penyelesaian Hutang kepada PH.
2. Penagihan langsung dengan surat Paksa.
3. Memaksimalkan PSBDT dan pelunasan BKPN.

**5. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK**

Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Berikut tabel target kesesuaian SBSK di tahun 2023:

		Capaian	% Setelah Pembobotan
Tingkat Kesesuaian SBSK K/L Baru (2021)	75%	82,70%	62,03%
Monev Tingkat Kesesuaian SBSK Th 2020	25%	80,68%	20,17%
<b>CAPAIAN IKU</b>			<b>82,20%</b>

Berikut tabel Realisasi IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK di tahun 2023:

KPKNL JEMBER	3. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	3a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Po/ K P
Target		50%	50%	55%	55%	68%	<b>68%</b>	Max/TLK
Realisasi		81,76%	81,76%	82,61%	82,61%	82,2%	<b>82,2%</b>	
Capaian		<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	

Langkah yang dilaksanakan untuk mencapai target adalah dengan melakukan pengukuran kesesuaian SBSK terhadap 274 NUP BMN dan melaksanakan monev kesesuaian SBSK terhadap 104 NUP BMN.

**6. Persentase BMN berupa tanah yang disertifikatkan**

IKU ini mengukur hasil Kerjasama Kementerian Keuangan c.q. DJKN bersama BPN dalam menerbitkan sertipikat BMN berupa tanah milik satker K/L.

Realisasi Raw data s.d. Q4 2023:

Kategori	K1	K2	K3	K4	Total	%
Target	53	82	579	178	892	
Realisasi	0	0	130	0	1116	125,11%

Target bidang tanah yang disertifikatkan adalah 892 bidang dengan realisasi 1116 bidang tanah, berikut kinerja selama tahun 2023:

KPKNL JEMBER	3. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	3b-CP Persentase BMN berupa tanah yang disertifikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Po/ K P
Target		40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi		21,52%	21,52%	60,2%	60,2%	125,34%	125,11%	
Capaian		53,81%	53,81%	100,34%	100,34%	120%	120%	

Dari tabel tersebut diketahui realisasi target IKU Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan sampai dengan Q4 2023 telah tercapai. **Target Tahunan tercapai.**

Langkah yang telah dilaksanakan untuk mencapai target adalah dengan Membantu satker secara langsung untuk menyelesaikan K4. Untuk bidang tanah kategori K4 yang belum bisa langsung update SIMAN seperti BBSK dan bidang tanah pensertipikatan mandiri, satker didorong untuk segera mempercepat penyelesaian. Berikut tabel yang menggambarkan kinerja dari tahun 2019 sampai dengan 2023;

Tahun	Target	Realisasi	%
2019	48	48	100%
2020	19	19	100%
2021	255	262	102,75%
2022	416	469	112,74%
2023	892	1116	125,11%

**7. Persentase Penyelesaian BKPN**

BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan BKPN Lunas, BKPN Penarikan, BKPN dikembalikan, dan BKPN PSBDT.

Berikut Target dan Capaian Efektivitas Penyelesaian BKPN:

Target BKPN	Realisasi NUP	%
61	74	121,31%

Capaian IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN tahun 2023 sebagai berikut:

KPKNL JEMBER	3. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	3c-CP Persentase Penyelesaian BKPN							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	PoI/ K P
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	<b>100%</b>	Max/TLK
Realisasi	4,92%	37,7%	37,7%	70,49%	70,49%	121,31%	121,31%	
Capaian	<b>49,2%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>117,49%</b>	<b>117,49%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	

Dari tabel tersebut diketahui realisasi target IKU Persentase Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN sampai dengan Q4 2023 telah tercapai. Tindakan yang dilaksanakan agar IKU tercapai adalah:

- a. Menerbitkan Panggilan Penyelesaian Hutang kepada PH.
- b. Penagihan langsung dengan surat Paksa.
- c. Memaksimalkan PSBDT dan pelunasan BKPN.

**8. Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian**

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Terdapat 50 laporan penilaian BMN yang diterbitkan oleh JFPP dan digunakan sebagai dasar penerbitan surat/keputusan pengelolaan BMN oleh Seksi PKN.

Berikut kinerja selama tahun 2023:

KPKNL JEMBER	4. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	4a-CP Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Min/TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Langkah yang dilakukan untuk mencapai target adalah menjalankan penilaian sesuai prosedur.

**9. Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien**  
 IKU Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien  
 Berikut kinerja selama tahun 2023:

KPKNL JEMBER	4. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	4b-CP Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	70	70	70	70	70	70	70	Max/Ave
Realisasi	91,67	81,79	86,73	72,4	81,95	92,61	84,62	
Capaian	120%		120%		117,08%		120%	

Langkah yang dilakukan untuk mencapai target adalah menjalankan penilaian sesuai prosedur.

**10. Tingkat tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara**

IKU ini difokuskan pada pemantauan tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan periode Semester II 2022 s.d. Semester I 2023. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pengguna barang atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh pengelola barang.

Capain Kinerja selama tahun 2023 dapat dilihat pada 2 tabel berikut:

Semester II 2022 ditindaklanjuti oleh K/L	40
Semester I 2023 ditindaklanjuti oleh K/L	26
Semester II 2022 diterbitkan KPKNL	45
Semester I 2023 diterbitkan KPKNL	27
<b>Capaian IKU</b>	<b>91,67%</b>

KPKNL JEMBER	5. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							
	5a-CP Tingkat tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	-	50%	50%	-	50%	86%	<b>86%</b>	Max/TLK
Realisasi	-	74,65%	74,65%	87,67%	87,67%	91,67%	<b>91,67%</b>	
Capaian		<b>120%</b>	<b>120%</b>		<b>120%</b>	<b>106,59%</b>	<b>106,59%</b>	

Dari tabel dapat diketahui bahwa IKU Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara selama tahun 2023 sudah tercapai. Tindakan yang telah dilakukan adalah :

1. Sosialisasi via media telepon dan pesan singkat untuk meningkatkan pemahaman kepada satker terkait aplikasi SIMAN.
2. Menyurati satker untuk input wasdal pada aplikasi SIMAN.

#### 11. Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).

Berikut gambaran target dan realisasi Implementasi Evaluasi Kinerja BMN selama tahun 2023:

Kategori	Bobot	Target Tahunan	Realisasi
Evaluasi Kinerja	80%	51	84
Rekomendasi	20%	5	6
<b>Capaian IKU</b>			<b>155,76%</b>

Berikut gambaran capaian IKU Evaluasi Kinerja BMN selama tahun 2023:

KPKNL JEMBER	6. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							
	6a-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	10%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	9,41%	9,41%	9,41%	58,04%	58,04%	155,76%	155,76%	
Capaian	78,43%	29,41%	29,41%	77,39%	77,39%	102,33%	102,33%	

Langkah yang dilakukan untuk mencapai target adalah melakukan survei evaluasi kinerja portofolio aset dan pemetaan NUP BMN yang telah dievaluasi (Komponen I) sebanyak total 84 NUP.

## 12. Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction

Implementasi e-auction meliputi Pelaksanaan Lelang e-Auction adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang dan E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account). Untuk kinerja selama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Realisasi
Jumlah Lelang e-Auction	661
Jumlah Lelang E-Conventional Auction	-
Frekuensi total Lelang	682
<b>Capaian IKU</b>	<b>96,92%</b>

KPKNL JEMBER	6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	6b-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	Max/TLK
Realisasi	96,34%	95,59%	95,59%	96,48%	96,48%	96,92%	96,92%	
Capaian	102,49%	102,11%	102,11%	102,63%	102,63%	103,11%	103,11%	

Langkah yang telah dilaksanakan untuk mencapai target adalah melaksanakan lelang e-auction maupun e-conventional auction sesuai prosedur.

**13. Persentase pelaksanaan permohonan lelang online**

IKU ini menghitung jumlah elang yang dimohonkan secara online dibandingkan dengan jumlah keseluruhan frekuensi lelang.

Berikut capaian s.d. Q4 2023:

Uraian	Realisasi
Jumlah permohonan lelang Online	642
Jumlah permohonan lelang	672
<b>Capaian IKU</b>	<b>95,54%</b>

KPKNL JEMBER	6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	6c-CP Persentase pelaksanaan permohonan lelang online							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target	20%	40%	40%	63%	63%	86%	<b>86%</b>	Max/TLK
Realisasi	96,34%	95,99%	95,99%	90,84%	90,84%	95,54%	<b>95,54%</b>	
Capaianl	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>111,09%</b>	<b>111,09%</b>	

Langkah yang telah dilaksanakan untuk mencapai target adalah melaksanakan lelang sesuai prosedur permohonan lelang online.

**14. Persentase pengembangan kompetensi pegawai**

IKU ini mengukur persentase banyaknya pegawai di bawah Kepala KPKNL Jember yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai, yakni memenuhi minimal 24 JP, serta minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan.

Berikut capaian s.d. Q4 2023:

Jumlah memenuhi kriteria (100%)	29
Pegawai total	29
% Capaian Utama	100.00%
Jumlah melebihi kriteria (20%)	29
Pegawai total	29
% Capaian Tambahan	100.00%
<b>Capaian IKU</b>	<b>120.00%</b>

KPKNL JEMBER	7. Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif							
	7a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Po/ K P
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	<b>100%</b>	Max/TLK
Realisasi	55,71%	107,14%	107,14%	120%	120%	120%	<b>120%</b>	
Capaian	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	

Tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai target adalah;

- a. Mendorong pegawai untuk mengajukan diklat melalui mekanisme DKI Q3 2023.
- b. Mendorong pegawai untuk mengajukan diklat melalui aplikasi Diklat.
- c. Mendorong pegawai untuk mengikuti e-learning KLC.

**15. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran**

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.

Kinerja selama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

KPKNL JEMBER	8. Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
	8a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Po/ K P
Targe	95,5	95,5	95,5	100	100	100	<b>100</b>	Max/TLK
Realisasi	114,6	107,23	107,23	112	112	120	<b>120</b>	
Capaian	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>112%</b>	<b>112%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	

Langkah yang dilaksanakan untuk mencapai target dengan menghitung kualitas anggaran s.d. Q4 2023 secara cermat.

Perbandingan kinerja dari tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Target	Realisasi	%
2019	95%	97,82%	102,96%
2020	95%	103,29%	108,72%
2021	95,5%	94, 9%	99,37%
2022	95,5%	92,42%	96,67%
2023	95,5%	120%	120%

**16. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan**

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2023 berfokus pada dukungan pencapaian atas Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang diukur oleh DJKN dan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang diukur oleh LKPP. IKU diukur dari 2 komponen yakni persentase dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan persentase dukungan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP).

Formulasi kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan dihitung berdasarkan 3 (tiga) komponen, yakni komponen e-sewa, sertifikasi, dan pengadaan.

Kinerja selama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

KPKNL JEMBER	8. Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
	8b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target						100%	<b>100%</b>	Max/TLK
Realisasi						260,33%	<b>260,33%</b>	
Capaianl						<b>120%</b>	<b>120%</b>	

Tindakan yang telah dilakukan untuk mencapai target adalah dengan menghitung realisasi IKU periode s.d. Q4 2023 secara manual melalui aplikasi SIMAN.

**17. Deviasi data PNBP fungsional DJKN**

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN diukur tanggal 7 bulan berikutnya, dari:

1. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN
2. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang dengan PNBP pada aplikasi OM

SPAN/KPPN  
Capaian s.d. Q4 2023:

	Target	Realisasi
Deviasi Lelang (Umum)	15,00%	0,00%
Deviasi PN	15,00%	0,00%
<b>Deviasi HI (Capaian IKU)</b>	<b>15,00%</b>	<b>0,00%</b>

KPKNL JEMBER	8. Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
	8c-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	Min/Tik
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	<b>120%</b>	

Tindakan yang dilakukan untuk mencapai target adalah:

1. Melakukan perhitungan bea lelang pada Dropbox lelang;
2. Melakukan perhitungan biad PPN pada FocusPN;
3. Melakukan rekonsiliasi bea lelang dan biad PPN melalui OMSPAN.

### 18. Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif

Kegiatan penilaian efektivitas UKI memiliki 11 (sebelas) unsur penilaian, yakni:

1. Dukungan SDM, Akses Data & Informasi, serta Komunikasi,
2. Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE),
3. Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA),
4. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPKEKP),
5. Penyusunan dan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS),
6. Penyusunan Profil Pegawai,
7. Penyusunan Simpulan dan LPPI,
8. Jumlah Pengaduan Masyarakat,
9. Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh AP/IP/IBI
10. Kepuasan Stakeholders, dan
11. Hasil Survei Penilaian Integritas.

Kinerja selama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut;

KPKNL JEMBER	9. Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif							
	9a-N Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Targe						60	<b>60</b>	Max/TLK
Realisasi						92,02	<b>92,02</b>	
Capaian						<b>120%</b>	<b>120%</b>	

Langkah yang telah dilaksanakan untuk mencapai target adalah;

- a. Menyusun EPITE 2023, PPITA Bulanan, Pemantauan Kode Etik S1-S2 2023, serta mengisi kertas kerja self assestment indeks pengawasan dan pengendalian yang efektif.
- b. Penilaian indeks dilakukan Kanwil DJKN Jatim dan telah disampaikan melalui nota dinas Kepala Kanwil DJKN Jatim Nomor ND-1399/WKN.10/2023 tanggal 27 Desember 2023.

### 19. Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko

Hasil perhitungan indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko 2023:

KPKNL JEMBER	9. Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif							
	9b-CP Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/ K P
Target						80	<b>80</b>	Max/Ave
Realisasi						95,16	<b>95,16</b>	
Capaian						<b>118,95%</b>	<b>118,95%</b>	

Tindakan yang telah dilakukan untuk mencapai target adalah:

- a. Menyiapkan bahan perhitungan Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko.
- b. Penilaian indeks dilakukan Kanwil DJKN Jatim dan telah disampaikan melalui nota dinas Kepala Kanwil DJKN Jatim Nomor ND-1249/WKN.10/2023 tanggal 17 November 2023 dan ND-1237/WKN.10/2023 tanggal 17 November 2023.

**B. Realisasi Anggaran**

KPKNL Jember dalam Tahun Anggaran 2023 mendapatkan dana dari pemerintah untuk membiayai tugas pokok dan fungsinya sebesar Rp 2.293.823.000,- (Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah). Adapun perincian pagu awal, realisasi serta saldo akhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

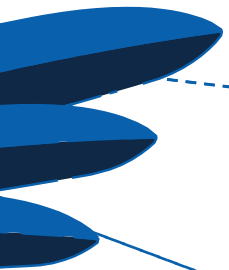
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Pagu	Realisasi	(%)	Saldo Sisa	(%)
1.	Belanja Barang	2.156.906.000	1.970.422.250	91,35%	186.483.750	8,65%
2.	Belanja Modal	136.917.000	125.097.670	91,37%	11.819.330	8,67%
	<b>Jumlah</b>	<b>2.293.823.000</b>	<b>2.095.519.920</b>	<b>91,35%</b>	<b>198.303.080</b>	<b>8,65%</b>

# BAB IV | Penutup



Penutup



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Indikator keberhasilan KPKNL Jember pada tahun 2023 tergambar dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama dengan status capaian **HIJAU**, yaitu sebagai berikut :

1. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang
2. Persentase Produktivitas Lelang
3. Indeks Integritas
4. Persentase Realisasi Pokok Lelang
5. IPersentase Penurunan Outstanding Piutang Negara
6. Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang Standar Kebutuhan
7. Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan
8. Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)
9. Deviasi ketergunaan hasil penilaian
10. Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien
11. Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara
12. Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)
13. Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction
14. Persentase pelaksanaan permohonan lelang online
15. Persentase pengembangan kompetensi pegawai
16. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan
17. Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN
18. Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif
19. Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko

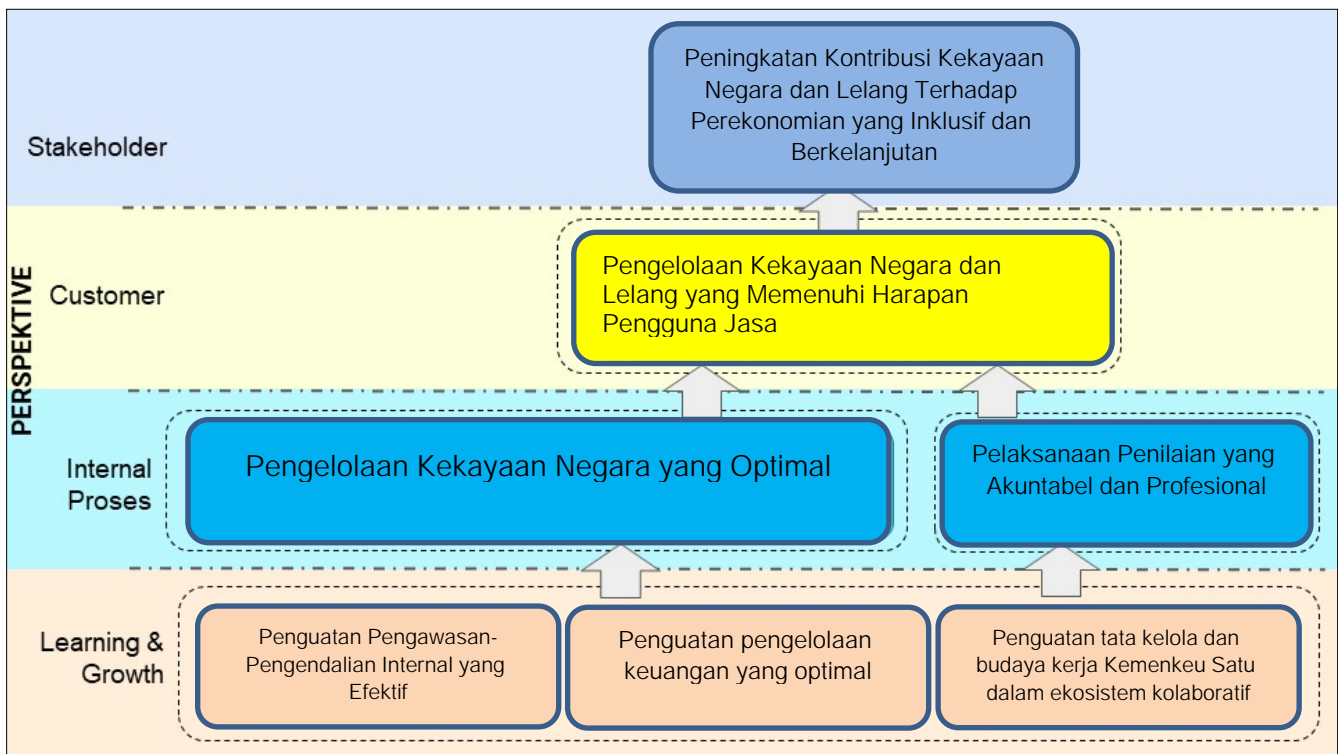
Sehubungan dengan capaian yang diuraikan di atas, KPKNL Jember akan terus melakukan upaya terobosan yang lebih baik pada tahun 2024 sehingga kinerja yang berhasil dicapai pada tahun 2023 diharapkan dapat terus meningkat di tahun 2024.



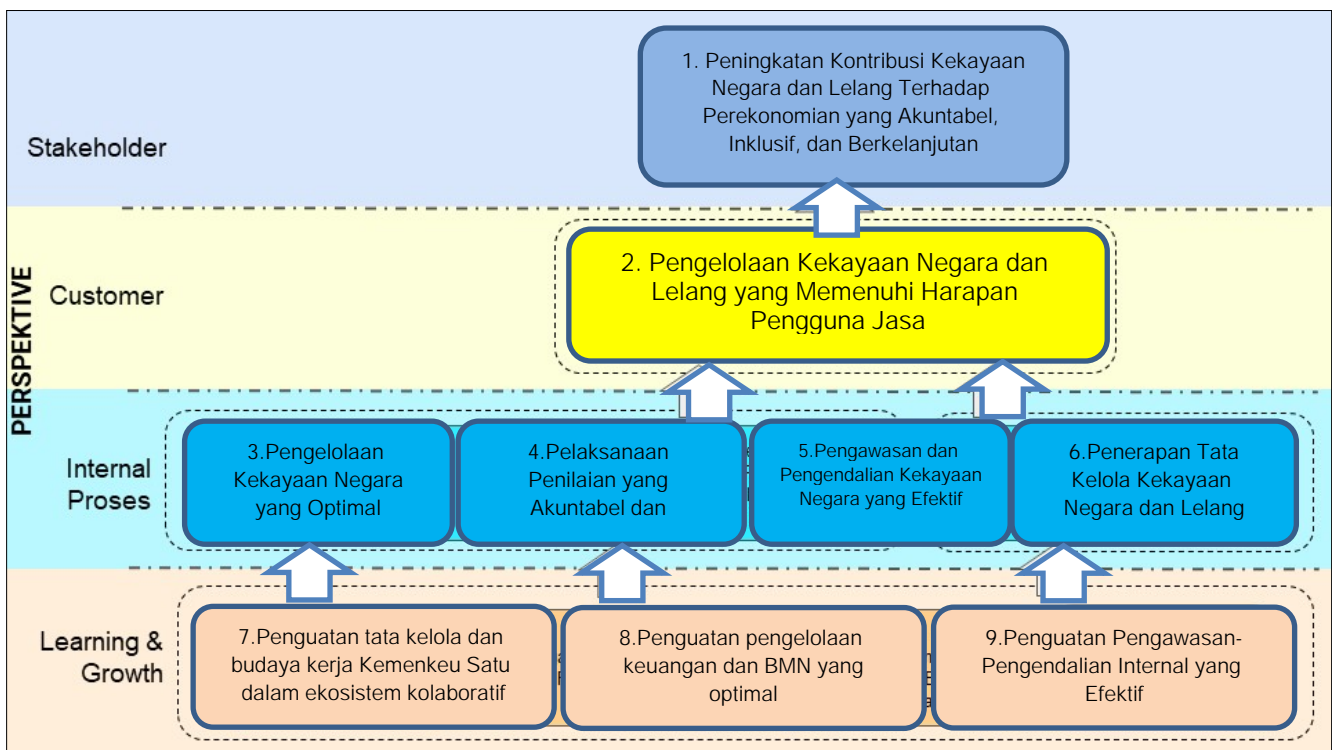
## ADENDUM PERJANJIAN KINERJA NOMOR : PK-04A/WKN.10/2023

Pada hari ini, telah disepakati adanya addendum atas Perjanjian Kinerja nomor PK-04/WKN.10/2023 tanggal 31 Januari 2023, dengan rincian sebagai berikut:

### Peta Strategis sebelum addendum :



### Peta Strategis setelah addendum :



#### a. Penambahan Sasaran Strategis

Sebelum	Menjadi		Penjelasan
	Kode SS	Sasaran Strategis	
-	Internal process perspective		
	5	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	Sasaran Strategis ditambahkan sebagai sasaran untuk pencapaian IKU Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara
-	Internal process perspective		
	6	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	Sasaran Strategis ditambahkan sebagai sasaran untuk pencapaian IKU Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset), IKU Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction, dan IKU Persentase pelaksanaan permohonan lelang online

#### b. Perubahan Nama Sasaran Strategis

Sebelum		Menjadi	
Kode SS	Nama Sasaran Strategis	Kode SS	Nama Sasaran Strategis
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan	1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan
6	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal	8	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal

#### c. Perubahan Nama IKU

Sebelum		Menjadi	
Kode IKU	Nama IKU	Kode IKU	Nama IKU
3h-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	6a-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

#### d. Reposisi IKU antar Sasaran Strategis

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d. Q3	Q4	s.d. Q4			Q3	s.d. Q3	Q4	s.d. Q4
Learning and growth perspective						Stakeholder perspective					
7	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif					1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan				
7a-CP	Indeks integritas	-	-	-	88,67	1c-CP	Indeks integritas	-	-	-	88,67
Internal process perspective						Internal process perspective					
3	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal					5	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif				
3g-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	50%	86%	86%	5a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	50%	86%	86%
Internal process perspective						Internal process perspective					
3	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal					6	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif				

3h-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75 %	75%	100%	100%	6a-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75 %	75 %	100%	100 %
3d-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94 %	94%	94 %	94%	6b-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94 %	94 %	94%	94%
3e-CP	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	63 %	63%	86%	86%	6c-CP	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	63 %	63 %	86%	86%
Internal process perspective						Learning and growth perspective					
3	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal					8	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal				
3f-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	15 %	15%	15 %	15%	8c-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	15 %	15 %	15%	15%

#### e. Penambahan IKU

Sebelum	Menjadi						Penjelasan
	Kode IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				
			Q3	s.d. Q3	Q4	s.d. Q4	
-	9b-CP	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	80	80	Pengganti IKU Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP yang dihapus dari PK KPKNL Jember nomor PK-04/WKN.10/2023

#### f. Penghapusan IKU

Sebelum						Menjadi	Penjelasan
Kode IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Q3	s.d. Q3	Q4	s.d. Q4		
7b-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP		-	-	88,67	-	IKU dihapus dari PK KPKNL Jember nomor PK-04/WKN.10/2023

#### g. Perubahan Trajectory Target IKU

Sebelum Adendum						Setelah Adendum					
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target				Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d. Q3	Q4	s.d. Q4			Q3	s.d. Q3	Q4	s.d. Q4
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	60%	60%	80 %	80%	1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80 %	80%	80%	80%
6a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5	95,5	95,5	95,5	8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100
6b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	85%	85%	100%	100%	8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	100%	100%

#### h. Perubahan Kode Sasaran Strategis dan IKU

Kode SS/IKU		Indikator Kinerja Utama
Sebelum Adendum	Setelah Adendum	
SS 5	SS 7	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif
5a-N	7a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

SS 6	SS 8	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal
6a-CP	8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
6b-N	8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan
SS 7	SS 9	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif
7c-N	9a-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif

Adendum PK ini mulai berlaku pada 1 Juli tahun 2023.

Surabaya, 27 September 2023

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Kekayaan Negara Jawa Timur



Ditandatangani Secara Elektronik  
Tugas Agus Priyo Waluyo

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  
Lelang Jember



Ditandatangani Secara Elektronik  
Wahyu Nendro

SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Juli s.d. 31 Desember Tahun 2023

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Wahyu Nendro, S.E., M.A.P.	NAMA	Tugas Agus Priyo Waluyo	
NIP	197110061997031002	NIP	196508281991031002	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur)	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	57,47%	Penerima Layanan
2.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, inklusif dan Berkelanjutan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur)	Persentase Produktivitas Lelang	80%	Penerima Layanan



3.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel inklusif dan berkelanjutan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur)	Indeks integritas	88,67	Penerima Layanan
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur)	Persentase Realisasi Pokok Lelang	60%	Penerima Layanan
5.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur)	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	24,32%	Penerima Layanan
6.	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur)	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68%	Proses Bisnis
7.	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur)	Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	60%	Proses Bisnis
8.	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur)	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	70%	Proses Bisnis
9.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur)	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	Proses Bisnis



10.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur)	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	Proses Bisnis
11.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur)	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	Proses Bisnis
12.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur)	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	68%	Proses Bisnis
13.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur)	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	Proses Bisnis
14.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur)	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	86%	Proses Bisnis
15.	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur)	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	Penguatan Internal atau Anggaran



16.	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
17.	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur)	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
18.	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur)	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	Penguatan Internal atau Anggaran
19.	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur)	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60	Penguatan Internal atau Anggaran
20.	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur)	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran

#### B. TAMBAHAN

#### PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan	Ekspektasi Khusus Pimpinan:



PERILAKU KERJA		
	- Melakukan perbaikan tiada henti	Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan:  Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan:  Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:  Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan,	Ekspektasi Khusus Pimpinan:



PERILAKU KERJA		
	Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:  Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan:  Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Pegawai yang Dinilai,

Surabaya, 01 Juli 2023  
 Pejabat Penilai Kinerja,





Ditandatangani secara elektronik  
Wahyu Nendro  
NIP 197110061997031002



Ditandatangani secara elektronik  
Tugas Agus Priyo Waluyo  
NIP 196508281991031002



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Juli s.d. 31 Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	30 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	-	-	-	30%	30%	57,47%	57,47%
2	Persentase Produktivitas Lelang	-	-	-	80%	80%	80%	80%
3	Indeks integritas	-	-	-			88,67	88,67
4	Persentase Realisasi Pokok Lelang	-	-	-	30%	30%	60%	60%
5	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	-	-	-	20%	20%	24,32%	24,32%
6	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	-	-	55%	55%	68%	68%
7	Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	-	-	-	20%	20%	60%	60%



8	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	-	-	-	30%	30%	70%	70%
9	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	-	-	-	25%	25%	25%	25%
10	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	-	-	-	70	70	70	70
11	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-	86%	86%
12	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	-	-	-	43%	43%	68%	68%
13	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	-	-	-	94%	94%	94%	94%
14	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	-	-	-	63%	63%	86%	86%
15	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	-	-	-	75%	75%	100%	100%
16	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	100	100	100	100
17	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	-	-	-	100%	100%
18	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	-	-	-	15%	15%	15%	15%
19	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	-	-	-	-	-	60	60
20	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	-	-	-	80	80

#### KONSEKUENSI

1. Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.



2. Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik  
Wahyu Nendro  
NIP 197110061997031002

Surabaya, 01 Juli 2023  
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik  
Tugas Agus Priyo Waluyo  
NIP 196508281991031002

